

BERBAGAI SISTEM DALAM KEHIDUPAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA)
Padangsidempuan
Nuryanti Siregar, M.A
Email: nuryantisiregar@gmail.com

Abstract: *Islam as a religion guided by revelation guides humanity to gain happiness in the word and the hereafter and to get that happiness must be with education. As a system, Islamic education is in the mids of various systems that exist in human life. It can be said that education is a system that is integrated with almost all systems in human life which involves many elements and parties that influence each other. Various system in life that effect the Islamic education system include economic, political, population, social and cultural system.*

Key Word: *Various systems in the life that effect the Islamic education system (economic, political, population, social and cultural systems).*

PENDAHULUAN

Pendidikan bagi umat manusia merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga dalam sejarah hidup manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitas hidupnya.

Islam sebagai agama yang dituntun oleh wahyu menuntun umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, harus dengan pendidikan. Sistem pendidikan juga dipengaruhi oleh beberapa sistem dalam kehidupan, diantaranya sistem ekonomi, politik, penduduk, sosial dan budaya.

A. Sistem Ekonomi

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang di dasarkan hukum-hukum yang didasarkan pada al Qur'an dan hadis untuk terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹

Dari segi sistem, pendidikan Islam dipandang sebagai proses yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam.² Dalam buku lain disebutkan sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan yang terpadu dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.³

Pendidikan Islam dipengaruhi oleh beberapa sistem yang saling berkaitan diantaranya sistem ekonomi, penduduk, politik, dan sosial budaya. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen -komponen yang masing-masing

¹Ahmad D.Marimba,*Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al Ma'arif , 1980), h.131

²M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h.116

³Nur Uhbiyati.*Ilmu pendidikan Islam (IPI)*, Untuk UIN-STAIN-PTAIS Fakultas Tarbiyah, Komponen MKMD. (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.165.

bekerja sendiri dalam fungsinya yang berkaitan dengan fungsi dari komponen yang lainnya yang secara terpadu bergerak menuju ke satu arah yang telah ditetapkan⁴ Sedangkan sistem ekonomi merupakan aliran-aliran untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.

Pelaksanaan suatu sistem pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan ekonomi yang stabil guna pengembangan lembaga pendidikan yang berkualitas, sistem perekonomian memberikan bantuan yang bersifat fisik material, seperti penyelenggaraan lembaga pendidikan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan proses pendidikan. Pemenuhan finansial tenaga pendidik (gaji) yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan yang mapan.

Menurut Hasan Langgulung relevansi antara aspek ekonomi dan pendidikan menyangkut investment dan hasilnya. Artinya apabila basis ekonomi suatu bangsa kuat dan besar, maka akan berdampak positif bagi pelaksanaan pendidikan. Bila hal ini tercipta, maka baik pula hasil pendidikannya.

Bahasa lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi input yang diperoleh dalam pendidikan maka semakin baik pula output yang dihasilkan, karena dari sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, akan menunjang untuk keberhasilan dalam pendidikan. Sebaliknya bila ekonomi suatu bangsa rendah dan tidak menunjang pendidikannya, maka mustahil suatu lembaga mampu memainkan peranannya dalam memajukan peradaban.

Terciptanya lembaga pendidikan yang berkualitas, akan berimplikasi dengan terbinanya suatu tatanan ekonomi yang tinggi pula. Karena lembaga pendidikan akan memainkan peranannya sebagai agent of change dengan melahirkan sejumlah manusia yang berkualitas bagi pembangunan peradaban yang tinggi, serta mampu mengelola dan menata kekayaan alam yang ada demi menunjang perekonomian yang stabil.

Dari sejarah perkembangan pendidikan Islam di zaman pertengahan yakni pada zaman kemajuan pengetahuan dalam Islam, dapat diketahui telah adanya suatu kesadaran perlunya biaya yang besar untuk membangun dan mengelola institusi pendidikan yang bermutu. Dalam beberapa buku sejarah pendidikan Islam dinyatakan bahwa Perdana Menteri Nizam al Muluk telah mengeluarkan dana yang luar biasa untuk pengelolaan pendidikan. Dana sebesar 600.000 dinar setiap tahun untuk membiayai seluruh madrasah yang diasuh oleh negara dan sebanyak 600.000 dinar untuk membiayai madrasah Nizamiyah Baghdad saja. Maka bila dihitung dengan emas, satu dinar 4,02 gram emas. Maka untuk biaya madrasah Baghdad sekitar 240 kilogram emas setahun dan untuk seluruh madrasah yang diasuh oleh negara menghabiskan lebih dari 2,4 ton emas setahun. Dan bagi para ilmuwan yang menulis karya ilmiah maka diberi imbalan dengan emas seberat timbangan buku yang ditulisnya.⁵

Hal tersebut bisa terjadi karena aktivitas ekonomi dalam Islam, pada masa itu mencapai puncaknya, dan ilmu pengetahuan dianggap suatu hal yang sangat penting

⁴ M.Arifin *Kapita selekta pendidikan Islam dan umum*, (Jakarta:Bumi Aksara,1995), h.72

⁵ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h.48

dan mulia. Bait Al-Hikmah sebagai lembaga pendidikan pertama yang dijadikan sebagai lembaga pengajaran dan pengkajian pendidikan Islam di Baghdad.⁶ Dan para pemimpin membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Serta didukung oleh sistem ekonomi yang pelaksanaannya adalah dengan sistem ekonomi Islam yang menuntut keridhoan Allah swt semata.

B. Sistem Penduduk

Peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam pendidikan atau perguruan keagamaan sangat penting bahkan sangat dominan. Sepanjang sejarah pendidikan Islam di kawasan ini, masyarakat muslim mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan, dan pemberdayaan pendidikan keagamaan.

Biasanya sistem pendidikan itu dipengaruhi juga oleh perubahan penduduk dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Penduduk mempengaruhi sistem pendidikan dan pendidikan juga mempengaruhi perubahan penduduk. Makin banyak penduduk maka makin banyak gedung-gedung yang dibutuhkan untuk melayani anak-anak. Pada saat yang sama pendidikan yang telah menghubungkan penduduk dalam kecakapan-kecakapan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Dalam dasawarsa terakhir ini, terdapat dua kecenderungan lain dikalangan masyarakat muslim. Kecenderungan pertama adalah mulai berkembangnya hasrat dan keinginan dalam kalangan masyarakat muslim untuk memberikan porsi lebih besar kepada pemerintah dalam upaya pendidikan/perguruan agama dalam berbagai segi. Hal ini terlihat misalnya dalam tingginya minat dikalangan masyarakat untuk menegerikan madrasah-madrasah swasta.

Kecenderungan kedua terjadinya konsolidasi sumber-sumber daya dan dana dikalangan masyarakat Muslim sendiri untuk membangun perguruan yang berkualitas. Dengan inisiatif dan dana sendiri, terdapat semakin banyak dikalangan masyarakat muslim untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam unggulan guna memenuhi kebutuhan akan pendidikan Islam. Dalam pandangan kalangan muslimin, bukan saatnya lagi mendirikan sekolah-sekolah atau madrasah yang asal-asalan, dengan kualitas yang memprihatinkan. Sekarang saatnya mendirikan dan mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas.⁸

Masyarakat Muslim yang akan membawa perubahan dalam pendidikan Islam memiliki wajah baru yang akan memunculkan masyarakat madani yakni masyarakat berperadaban dengan menekankan kepada demokrasi dan hak-hak asasi manusia, serta hidup dalam berkeadilan.

Menurut Nurcholis Majid masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada masyarakat Madinah. Muhammad Rasulullah di Madinah membangun tatanan masyarakat yang berperadaban. Ada beberapa ciri dari masyarakat Madinah itu, *Pertama* Masyarakat Rabbaniyah, masyarakat religius yang dilandasi semangat berketuhanan. *Kedua* Masyarakat demokrasi menghidupkan suasana demokrasi di kalangan masyarakat Madinah dan sahabat-sahabat beliau, hidup dalam suasana

⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), h.136

⁷ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h.115

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, (Ciputat : PT logos Wacana Ilmu, 1999), h.150

musyawarah dalam segala hal. *Ketiga* masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk (plural) baik dari segi suku maupun agama. *Keempat* berkeadilan. *Kelima* masyarakat berilmu.⁹

Kelima pilar inilah gambaran dari masyarakat Madinah yang sekaligus merupakan gambaran masyarakat Madani. Jika demikian halnya maka masyarakat Madani yang ingin diraih tersebut mestilah memiliki prinsip-prinsip pokok yang mengacu kepada lima pilar tersebut.

Tantangan globalisasi menuntut perhatian yang sungguh-sungguh dari semua lapisan masyarakat untuk menghadapi dampak negatifnya. Tantangan pertama bagi pendidikan adalah kualitas. Di era globalisasi pada dasarnya muncul era kompetensi. Berbicara kompetensi adalah berbicara tentang keunggulan. Manusia yang unggul adalah manusia yang mampu *survive* di dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan, maka persoalan yang muncul adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Membentuk manusia unggul partisipatoris yaitu manusia yang ikut secara aktif dalam persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik. Keunggulan partisipatoris itu dengan sendirinya adalah berkewajiban untuk menggali dan menggambarkan seluruh potensi manusia yang akan digunakan dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan yang semakin hari semakin tajam.

C. Sistem Politik

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti sistem dasar pemerintahan.¹⁰ Secara sederhana politik dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kenegaraan, menyangkut proses penentuan yang ada, menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, serta melaksanakan berbagai ketetapan, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan.¹¹

Sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dilaksanakan dalam masyarakat. Sistem politik dibedakan dari sistem lain yang memiliki empat ciri khas, *pertama*, daya jangkauan yang universal, meliputi semua anggota, *kedua* kontrol mutlak atas pemakaian kekerasan fisik, *ketiga*, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima sebagai keputusan. Dan *keempat* keputusannya bersifat otoritatif, artinya mengandung daya pengabsahan dan kerelaan yang besar.

Selanjutnya sistem politik itu meliputi:

- a. Sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan.
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain.

⁹ Haidar Putra, *Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.200

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2002), h.886

¹¹ Samsul Nizar, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), h.XI

- c. Kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik sebagai suatu sistem sangat erat hubungannya dengan pola hubungan masyarakat dengan negara. Wujud dari hubungan itu adalah lahirnya sebuah istilah demokrasi.

Dalam prakteknya demokrasi sebagai suatu sistem bagi sebuah masyarakat/negara akan memberikan corak/karakteristik terhadap segala aspek kehidupan yang salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, padahal keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat suatu negara. Lebih dari itu keduanya saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat disuatu negara.¹³

Kalau dilihat dari sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan politik di Indonesia.

Selama masa penjajahan Belanda, Pendidikan Islam hidup dan berkembang atas kekuatan sendiri dan tidak mendapat bantuan dari pemerintahan Belanda. Pendidikan Islam bukan hanya dianggap tidak bermamfaat bagi Belanda tetapi juga dianggap akan melahirkan kader-kader yang akan menentang penjajahan. Karena pada saat itu pendidikan Islam sebagai komunitas kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Belanda.¹⁴

Selain itu pemerintahan Belanda juga menempuh usaha yang mematkan kegiatan-kegiatan Islam. Seperti dengan mempelajari hal ikhwal pribumi dan agama Islam yang merupakan ilmu khusus yang dikenal dengan indologi yang diperdalam di negeri Belanda. Belanda juga berusaha mencari kelemahan Islam untuk menghadapi umat Islam Indonesia, dengan mengutus Prof.Dr,Christian Snouck Hurgronje ke Mekkah untuk mempelajari Islam, dan namanya diganti dengan Abdul Gaffar.

Belanda juga menerapkan peraturan dan kebijakan antara lain:

- 1) Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Resterraden*. Dari nasehat badan inilah, maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu kepada pemerintahan Belanda.
- 2) Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu tidak semua orang kiai memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi dari pemerintahan Belanda.
- 3) Pada tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan yang isinya berupa wewenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang

¹²Ramayulis, *Op.,cit* h.48-49

¹³ M.Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2005), h.1

¹⁴ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan anak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), h.91

tidak ada izin, atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintahan Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah luar wilde School Orrdonantie.

Pemerintah Belanda juga juga memberikan wewenang kepada bupati atau pejabat yang berkedudukan untuk mengawasi dan mengecek apakah guru bertindak sesuai dengan izin yang diberikan, dan memberikan pengwasan pada anak didik. Pengawasan yang terus menerus dianggap oleh guru agama Islam sebagai pembatas kemerdekaan. Peraturan ini juga dianggap membatasi permasalahan yang dibicarakan didalam memberikan pelajaran, yang dirasakan pembatasan yang benar-benar terbatas.¹⁵

Misi missionaris Belanda tidak hanya dilakukan lewat ekonomi saja tetapi juga dilakukan lewat pendekatan pendidikan. Lembaga pendidikan dianggap sebagai sarana yang paling baik dan efektif baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Setelah telah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia, maka muncul pergerakan Jepang. Jepang tidak begitu ketatnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan penduduk pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, bahkan Jepang mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia.

Pada masa penjajahan Jepang banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak dibolehkan untuk belajar agama dan mengaji.

Masa kemerdekaan keadaan pendidikan Islam lebih baik terutama setelah dibentuknya Departemen Agama dan Departemen Agama mengusul tiga hal yaitu:

- 1) Memberikan pelajaran agama di sekolah negeri dan partikulir
- 2) Memberikan pengetahuan umum di madrasah
- 3) Mendirikan pendidikan agama (PGA) dan pendidikan Hakim agama Islam Negeri(PHIN)

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No.4 Tahun 1950 ditetapkan bahwa di sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama dengan catatan orang tua murid yang menetapkan keikutsertaan anaknya. Dengan demikian secara *dejure* posisi pendidikan Islam relatif kuat atau minimal memiliki kekuatan hukum.

Pendidikan agama Islam benar-benar memiliki posisi yang kuat setelah Orde Baru yang berhaluan anti komunis mengambil alih kekuasaan. Kebijakan tentang pendidikan agama dilaksanakan berdasarkan pokok kebijaksanaan:

- 1) Pemerintahan Orde baru lebih condong kepada Islam karena hanya Islam yang benar-benar anti komunis. Pendidikan agama diwajibkan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan dan merupakan rangkaian pemberantasan komunisme sampai keakar-akarnya.
- 2) Sebagai ucapan terima kasih kepada umat Islam yang bersama ABRI telah menyelamatkan ideologi negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari G.30.S.PKI yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme

¹⁵Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.310

- 3) Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi tuntutan rakyat yang secara obyektif sangat memerlukan pendidikan agama. Sebab fungsi pemerintahan disamping mengemban amanah yang bersifat politis juga amanat di bidang edukatif, termasuk didalamnya pendidikan agama.¹⁶

Maka secara ekstrinsik, pengaruh politik terhadap pendidikan Islam adalah adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan suatu negara yang memberikan perhatian serta dukungan moral maupun material bagi kelangsungan pelaksanaan pendidikan Islam. Situasi kondusif ini akan memberikan kesempatan dan pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh atau tidaknya pendidikan Islam, akan tetapi, bila politik suatu negara mengalami kegoncangan stabilitas, maka akan mustahil suatu lembaga pendidikan akan mampu bertahan dan memerankan perannya dengan baik.

Secara implisit, pendidikan yang bermutu tinggi, juga akan ikut mempengaruhi perkembangan politik yang ada, artinya, semakin baik pendidikan di suatu negara, maka akan melahirkan generasi yang berkualitas, sehingga akan berimbang dengan tingginya peradaban suatu bangsa. Bila ini terjadi, akan semakin baik pula sistem ekonomi negara yang berarti akan memantapkan politik pemerintahannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem politik yang berlaku pada suatu negara cukup besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan sistem pendidikan Islam, baik terhadap kurikulum dan materi pelajaran dan pengadaan guru maupun kebijaksanaan lain yang menyangkut identitas sebuah lembaga pendidikan Islam.

D. Sistem Sosial Budaya

Bahasan selanjutnya akan mencoba mengkaji masalah pendidikan dalam suatu dirkursus kebudayaan dengan penekanan pada persoalan perubahan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah masyarakat yang berkomunikasi dalam usaha meningkatkan pembangunan.¹⁷ Bahasan demikian didasarkan pemikiran bahwa perubahan sosial pada hakikatnya merupakan fenomena kebudayaan. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan dalam kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua bagian kebudayaan termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan seterusnya, maupun perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial, walaupun secara teoritik konseptual pemisahan pengertian keduanya dapat dirumuskan, namun dalam kehidupan yang nyata garis pemisah tersebut sulit untuk dibedakan.

Dalam kehidupan masyarakat pendidikan sangat dibutuhkan khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian pendidikan dan masyarakat sangat erat hubungannya.

Sistem budaya merupakan rangkaian hubungan komponen-komponen budaya sebagai ungkapan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sebagai makhluk budaya. Namun demikian, dalam mekanisme tersebut, tidak terpisahkan dari hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial yang menghubungkan antar individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok lainnya. Disini terbentuklah suatu tatanan konsep sebagai sistem sosial. Sistem ini terbentuk, sebagai akibat hubungan sosial

¹⁶ Ramayulis, *Op.,cit* h.50

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia,OP.,cit*, h.886

antar komponen-komponen sosial dalam bentuk tindakan, perbuatan dan perilaku pendukungnya.

Dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia kita bisa melihat betapa besarnya pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan Islam. Pada masa dahulu pesantren banyak dipengaruhi oleh masyarakat tradisional yang identik dengan pola pikir tradisionalnya juga beranggapan bahwa yang dikatakan pendidikan Islam itu adalah belajar al-Qur'an dan ilmu agama semata. Masyarakat perkotaan yang identik dengan pola pikir modern cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah umum. Seiring dengan perkembangan zaman, orientasi tersebut telah berubah. Masyarakat berkembang saat ini tidak hanya membutuhkan pendidikan agama yang komprehensif karena tuntutan zaman demikian pesat dan kompetitif. Hal ini ditandai dengan munculnya pesantren terpadu atau modern yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengajarkan sains dan teknologi

Sanafial Faisal mengemukakan bahwa hubungan antar sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak, bisa dilihat dari dua segi :

1. Sekolah sebagai mitra masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional
2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.

Kontak hubungan dengan masyarakat memudahkan organisasi pendidikan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya dalam masyarakat dalam arti dapat diterima sebagian dari milik warga masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat dan lingkungannya.¹⁸

Untuk mempertahankan tatahan kehidupan di masyarakat, maka generasi muda harus meneruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi berikutnya dengan pendidikan dan interaksi sosial.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi merupakan aliran-aliran untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.

Pelaksanaan suatu sistem pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan ekonomi yang stabil guna pengembangan lembaga pendidikan. Sistem pendidikan itu dipengaruhi juga oleh perubahan penduduk dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Makin banyak penduduk maka makin banyak fasilitas yang dibutuhkan untuk melayani pendidikan anak-anak.

¹⁸Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.182

Sistem politik Dalam prakteknya demokrasi sebagai suatu sistem bagi sebuah masyarakat/negara akan memberikan corak/karakteristik terhadap segala aspek kehidupan yang salah satunya adalah pendidikan.

Sistem sosial adalah masyarakat yang berkomunikasi dalam usaha meningkatkan pembangunan dan tidak terpisahkan dari hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial yang menghubungkan antar individu dengan individu sehingga terjadinya interaksi dengan pendidikan.

Dari pemahaman tentang sistem yang mempengaruhi sistem pendidikan tidak bisa dari beberapa sistem dalam kehidupan, diantaranya sistem ekonomi, politik, penduduk, sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Arifin, M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- _____ *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam*, Ciputat: PT logos Wacana Imu, 1999
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai pustaka, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai pustaka, 2002
- Nizar, Samsul, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2001
- _____, *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta: Kencana, 2007
- Pidarta, Made, *Menejemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Putra, Haidar, *Pendidikan Islam* Jakarta: Kencana, 2004
- Rachma, Abdul Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan anak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006
- Sirozi, M., *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005

